

PERAN CIVIL SOCIETY DALAM MENUNJANG TERCAPAINYA GOOD GOVERNANCE DI DESA SANREGO KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE

Kiki Rasmala Sani¹, Mursak Mursak²

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Kikirasmalasani313@gmail.com

uccamursak@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the role of civil society in supporting the achievement of good governance in Sanrego Village, Kahu District, Bone Regency. The focus of this research are: (1) the role of civil society (free public share, democracy, tolerance, pluralism, social justice); (2) good governance (transparency, cooperation, accountability). This research was conducted at the location in Sanrego Village, Kahu District, Bone Regency. Based on the type of data, this research is a qualitative research. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, decision making or verification. The results of this study reveal that: the role of civil society in supporting the achievement of good governance in Sanrego Village, Kahu District, Bone Regency is proven by community involvement, both old and young, such as in free public share, democracy, tolerance, ethnic pluralism living in the village. Sanrego however still respects and respects religious activities and customs, and the high social conditions (helping each other) among members of the community.

Keywords: Civil Society, Good Governance, Democracy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran *civil society* dalam menunjang tercapainya *good governance* di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Fokus penelitian ini yaitu: (1) peran *civil society* (*free public share*, demokrasi, toleransi, kemajemukan, keadilan sosial); (2) *good governance* (transparansi, kerjasama, akuntabilitas). Penelitian ini dilakukan di Lokasi di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, Pengambilan

keputusan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa: peran *civil society* dalam menunjang tercapainya *good governance* di Desa Sanrego kecamatan Kahu Kabupaten Bone di buktikan dengan keterlibatan masyarakat baik kalangan tua maupun kalangan muda seperti dalam *free public share*, berdemokrasi, sikap toleransi, kemajemukan suku yang tinggal di Desa Sanrego namun tetap menghargai dan menghormati kegiatan keagamaan dan adat istiadat, dan masih tingginya kondisi sosial (saling membantu) antar warga masyarakat.

Kata Kunci: *Civil Society, Good Governance, Demokrasi*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan konsep *good governance*. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan antara tiga pilar, yaitu sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor masyarakat yang saling berkesinambungan dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Good governance adalah konsep pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. *Good governance* tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintahan saja, tetapi juga menyangkut masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintah (LSM) dan juga menyangkut sektor swasta.

Civil society atau masyarakat madani merupakan konsep yang memiliki banyak arti dan sering dimaknai secara berbeda. Namun semua ahli sepakat bahwa harus ada partisipasi yang bersifat sukarela dari sebagian warga masyarakat, tidak termasuk perilaku yang dilakukan karena keterpaksaan.

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan parameter untuk merujuk masyarakat madani adalah: 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga dan kelompok dalam masyarakat; 2) berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan

dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok; 3) tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial; 4) Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan; 5) Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan; 6) Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial; 7) adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya (Vita Fitria, 2020:14).

Fenomena tuntutan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih menjadi daya tawar tersendiri bagi keharusan mewujudkan masyarakat madani. Sebab keduanya memiliki keterkaitan yang saling membutuhkan. Di satu sisi, pemerintahan yang bersih menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat madani yang sehat, pada sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat madani tentu akan menuntut *performance* pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan profesional. Dari sisi, makna demokrasi kemudian menjadi sebuah kunci bagi solusi yang harus diwujudkan, dalam rangka menentukan proses pertumbuhan pemerintahan yang bersih sekaligus perkembangan masyarakat madani (Riyadi, 1985:19).

Terkaitan dengan hal tersebut maka untuk melahirkan *good governance* diperlukan keterlibatan masyarakat sepenuhnya, demikianlah yang terjadi pada masyarakat di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Kabupaten Bone dengan slogan Bone *Makkiade'*

nya atau Bone beradat tentunya motto tersebut lahir tidak terlepas dari sejarah yang pernah ada. Sejarah mencatat bahwa Bone dahulu merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara pada masa lalu. Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat memberi pelajaran dan hikmah yang bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi kecenderungan yang bersifat global (Fahril Jaya, 2020 :17).

Berdasarkan hasil pengamatan awal bahwa *civil society* untuk mewujudkan *good governance* di Desa Sanrego cukup terlihat ada, hal itu terlihat dari beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk dirinya dalam suatu kelembagaan yang terstruktur.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1. *Taxonomi Literatur Review*

No	Nama Penulis Tahun, Judul dan Sumber Jurnal	Fokus Penelitian	Metodologi	Temuan
1	Ipah Ema Jumiati (2019), Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat Sipil (<i>Civil Society</i>) Melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Cilegon, Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Untuk mengetahui Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat Sipil (<i>Civil Society</i>) Melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Cilegon	Jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus.	Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil (<i>Civil Society</i>) Melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon merupakan komitmen bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sinergitas ini akan berguna untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki <i>financial performance</i> dan akses pada modal, meningkatkan <i>corporate image</i> dan penjualan/layanan jasa, memelihara kualitas kerja, memperbaiki keputusan pada isu-isu kritis, serta menangani resiko secara lebih efisien dan mengurangi biaya jangka panjang. Dengan dukungan berbagai <i>stakeholder</i> pada ranah ekonomi, sosial dan lingkungan, yang diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan. Sumber pendanaannya dihasilkan dari kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil (<i>civil society</i>) berdasarkan kesepakatan-

				<p>kesepakatan yang dibangun bersama, untuk kepentingan ke depan dalam jangka panjang yang lebih baik. Sebagai outputnya adalah pemberdayaan masyarakat Cilegon dalam pengentasan kemiskinan melalui kerangka <i>good corporate governance</i>.</p>
2	<p>Vita Fitria, (2020), Civil Society, Konsep Ummah Dan Masyarakat Madani, Journal of Business and Management e-ISSN: 2460-3767 p-ISSN: 2656-6885</p>	<p>Untuk mengetahui Civil Society, Konsep Ummah Dan Masyarakat Madani secara teori.</p>	<p>Jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kepustakaan</p>	<p>Konsep <i>ummah</i>, <i>civil society</i> dan masyarakat madani mempunyai definisi dan penjelasan yang cenderung mempunyai beberapa persamaan. Ketiganya mempunyai landasan yang sama yakni menekankan pada prinsip-prinsip toleransi, desentralisasi, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik, sukarela, swasembada, swadaya, otonom, dan konstitusionalisme dan sebagainya. Meskipun demikian, pemahaman dan aplikasi tentang ketiga konsep tersebut tidak bisa dikerucutkan kedalam satu pemikiran yang seragam. <i>Civil society</i> lebih mengindik dari proses sejarah masyarakat Barat. Dalam hubungannya dengan sejarah panjang umat Islam, pola-pola seperti yang tercermin dalam konsep <i>civil society</i></p>

				tersebut sudah dibangun oleh Rasullullah ketika di Madinah dengan konsep <i>Ummah</i> , yang tercatat dalam Piagam Madinah. Sementara konsep <i>Masyarakat Madani</i> merupakan suatu istilah untuk memudahkan dan memaknai konsep <i>civil society</i> dan konsep ummah dalam konteks Islam dan Indonesia.
--	--	--	--	---

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu yang mencari informasi lewat penelitian lapangan. Dalam penelitian ini mencoba mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dinyatakan terhadap peristiwa gejala-gejala yang diteliti dan situasi alami. Jenis data terbagi menjadi dua yakni data Primer dan sekunder. Terkait dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah ada akan dianalisis dengan cara mereduksi data, kemudian data yang telah direduksi akan disajikan sebelum dilakukan analisis untuk menemukan penarikan kesimpulan sementara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wilayah Publik yang Bebas (*Free Public Shere*)

Pada unsur pertama masyarakat sipil diberikan ruang untuk dapat memiliki posisi dan hak serta kebebasan yang sama dalam mengemukakan pendapat untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan di luar *civil society*. Kemudian

dalam partisipasi masyarakat tersebut pihak pemerintah secara transparansi, kerjasama, akuntabilitas kepada publik agar tercapai tujuan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa warga masyarakat yang berada di Desa Sanrego diberikan kesempatan lewat beberapa kegiatan misalnya kegiatan musyawarah desa tetapi tidak hanya itu yang terjadi di Desa Sanrego, sejak adanya salah satu lembaga kepemudaan yang terbentuk di Desa Sanrego yaitu Karang Taruna Bolong Sanrego banyak menginspirasi kalangan muda di desa tersebut menyalurkan kebersamaan ide, dimana tujuan dibentuknya lembaga masyarakat tersebut yaitu sebagai wadah pemersatu, tempat tukar tambah dan silaturahmi pemuda Desa Sanrego. Peran *civil society* di lingkungan desa Sanrego yaitu berupa terbentuknya karang Taruna Bolong Sanrego. Lewat Lembaga pemuda ini pemerintah desa Sanrego menjadikan sebagai mitra kerja dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Selain itu lewat lembaga tersebut diberikan posisi dan hak serta kebebasan yang sama dalam mengemukakan pendapat.

2. Demokrasi

Demokrasi berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Kemudian dalam interaksi demokrasi masyarakat tersebut pihak pemerintah secara transparansi, kerjasama, akuntabilitas kepada publik agar tercapai tujuan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa sistem demokrasi di Desa Sanrego banyak telah dilakukan oleh masyarakat sipil seperti pemilihan kepala desa, kegiatan sosial, kegiatan kesenian, kegiatan ekonomi (jual beli hasil pertanian), dan lomba-lomba di bidang pendidikan. Selain itu, Pemerintah Desa termasuk pihak keamanan memberikan hak

rakyat kepada masyarakat desa Sanrego untuk bermusyawarah, memilih, memutuskan dan melibatkan diri yang termasuk dalam sistem berdemokrasi.

Adapun data data hasil temuan yang penulis amati dari sistem berdemokrasi serta hasil dari sistem demokrasi tersebut oleh masyarakat Desa Sanrego dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Sistem Berdemokrasi Serta Hasil dari Sistem Demokrasi di Desa Sanrego

No	Sistem Demokrasi	Bidang	Hasil dari Sistem Demokrasi
1	Pemilihan kepala desa	Politik	Memilih calon kepala desa
2	Musyawarah Desa	Pembangunan	Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
3	Pemerintah beserta masyarakat terlibat dalam kegiatan sosial	Pendidikan, sosial, kesenian, dan lain sebagainya	Pencapaian prestasi, memunculkan bakat dan minat di usia muda, membangun gotong royong, partisipatif dalam kemajuan desa dan Sumber daya manusia.

Sumber data: Hasil penelitian, 2021

Tabel 1. tersebut menunjukkan bahwa sistem demokrasi di desa Sanrego terbangun hal itu ditunjukkan dengan pemerintah desa memberikan hak memilih kepala desa, bermusyawarah, serta Pemerintah beserta masyarakat terlibat dalam kegiatan sosial.

3. Toleransi

Toleransi ini memungkinkan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. Kemudian dalam sikap toleransi masyarakat tersebut pihak

pemerintah secara transparansi, kerjasama, akuntabilitas kepada publik agar tercapai tujuan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa sikap toleransi masyarakat Desa Sanrego masih cukup tinggi, hal itu dilihat dari cara menolong tetangga yang kesulitan, tidak mengganggu kegiatan ibadah, memecahkan masalah dengan cara musyawarah.

4. Kemajemukan

Kemajemukan sebagai sebuah prasyarat penegakan hukum adat ataupun norma di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam penegakan hukum adat ataupun norma di tengah-tengah masyarakat tersebut pihak pemerintah secara transparansi, kerjasama, akuntabilitas kepada publik agar tercapai tujuan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa masyarakat Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone secara umumnya adalah pemeluk agama Islam, sebagaimana masyarakat kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya merupakan pemeluk Agama Islam yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang serba Religius. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan sekolah Pendidikan Agama Islam yang berada di Desa Sanrego.

Adapun jumlah mesjid dan sekolah yang bernuansa islam di Desa Sanrego yang digunakan oleh warga masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Mesjid dan Sekolah Bernuansa Islam di Desa Sanrego

No	Dusun	Keterangan	Jumlah
1	Teko	Mesjid	2
2	Berru I	Mesjid	1
3	Berru II	Mesjid	1

4	Poppai	Mesjid, MTs	1
5	Batu Tire	Mesjid	1
6	Mahung	Mesjid	1

Sumber data: Kantor Desa Sanrego, 2021

Dari tabel tersebut maka dapat dijelaskan bahwa ada 6 dusun dari tujuh dusun yang ada di Desa Sanrego memiliki mesjid yaitu di dusun Teko ada 2 mesjid, Dusun Berru I ada 1 mesjid, Dusun Berru II ada 1 mesjid, Dusun Poppai ada 1 mesjid, Dusun Batu Tire ada 1 mesjid, Dusun Mahung ada 1 mesjid sedangkan dusun yang tidak memiliki mesjid yaitu Dusun Ujung Ale karena Dusun ini luas wilayahnya kecil dan dekat dengan Dusun Mahung. Kemudian lokasi sekolah bernuansa Islam yang ada di Desa Sanrego berada di Dusun Poppai, sekolah tersebut dikhususkan pada anak pra remaja yaitu 12 sampai 15 tahun dengan status sekolah swasta dengan nama sekolah MTs. Sanrego.

Kemudian selain kegiatan keagamaan di Desa Sanrgo juga masih kental dengan budaya adat bugis yang masih jaga kelestariannya dan warga masyarakat Desa Sanrego masih melakukan kegiatan runitas adat tersebut. Adapun kegiatan adat tersebut seperti: *malamppu ase*, *mabbissa lompo*, *maddengeng*, *massahung manu*, *tudang sipulung risaoraja*, *mappacing*, *barazanji*.

Tabel 3. Tradisi Adat yang Masih dijalankan Warga Masyarakat Desa Sanrego

No	Nama Tradisi Adat	Keterangan	Waktu pelaksanaan
1	<i>Malamppu ase</i>	Menumbuk padi yang telah dipanen yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Sanrego secara gotong royong	Di laksanakan pada bulan November tiap tahun
2	<i>Mabbissa lompo</i>	Mencuci benda pusaka	Di laksanakan pada bulan

			November tiap tahun
3	<i>Maddengeng</i>	Berburu babi atau rusa di hutan	Di laksanakan pada bulan November tiap tahun
4	<i>Massahung manu</i>	Sabung ayam	Di laksanakan pada bulan November tiap tahun
5	<i>Tudang sipulung</i>	Duduk bersama dengan tokoh adat, pemerintah dan masyarakat desa	Di laksanakan pada bulan November tiap tahun
6	<i>Mappacing</i>	Tradisi dalam pernikahan bugis khusus untuk pengantin perempuan	Di laksanakan 1 hari sebelum akad nikah
7	<i>Barazanji</i>	Membaca atau melantunkan bacaan kitab kuning	Dilaksanakan sebelum akad nikah

Sumber Data: Hasil penelitian, 2021

Dari tabel 3. tersebut menjelaskan bahwa sebagai orang bugis yang masih menjaga adat istiadat nenek moyang, beberapa tradisi yang masih dilestarikan oleh anak muda di Desa Sanrego seperti *malamppu ase*, *mabbissa lompo*, *maddengeng*, *massahung manu*, *tudang sipulung*, *mappacing*, *barazanji*. Tujuan dari tetap adanya adat tradisi tersebut karena adat istiadat tersebut sangat sakral dan bisa menumbuhkan rasa persatuan dikalangan warga masyarakat di desa Sanrego. Contohnya pada kegiatan *tudang sipulung* yang kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November tiap tahun dimana tokoh adat, pemerintah dan masyarakat desa duduk bersama untuk mengucapkan syukur atas berlimpahnya hasil panen mereka.

Gambar Kegiatan Tudang Sipulung pada Tahun 2019.



Dari keterangan yang diperoleh tersebut maka diketahui bahwa pada tahun 2019 kita masih sempat melakukan *tudang sipulung* dimana banyak warga yang menghadiri kegiatan tersebut tetapi pada tahun 2020 karena pemerintah desa Sanrego harus menaati protokoler covid-19 maka tudang sipulung 2020 dilakukan di kantor desa dengan mengundang aparat desa, lembaga masyarakat dan beberapa perwakilan warga saja. Perlu pula di ketahui bahwa selain suku bugis yang menempati di Desa Sanrego juga ada suku jawa

5. Keadilan Sosial

Keadilan sosial dimaksudkan bagi seluruh warga masyarakat, di mana terdapat suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa warga Desa Sanrego yang merupakan masyarakat yang menempati suatu wilayah dengan keterbatasan yang dimilikinya. Kemudian masyarakat nya sering berinteraksi langsung dengan lingkungan alamnya yang masih asli sehingga hal ini memicu hampir seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja dengan bertani, dan berkebun. Selain itu kondisi sosial masyarakat Desa Sanrego yang dikatakan masih jauh dari kemajuan teknologi. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat

cenderung memiliki nilai sosial yang tinggi yaitu berupa ikatan yang kuat antar sesama sehingga ketika yang satu sedang tertimpa musibah, mereka juga akan larut dalam kesedihan. Masyarakat pedesaan yang tertinggal dengan pembangunan adalah masyarakat yang sulit untuk dijangkau, mereka jauh dari pusat kota serta minim akan pendidikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa peran *civil society* dalam menunjang tercapainya pemerintahan yang baik terlihat dari kondisi sosial masyarakat Desa Sanrego seperti aktivitas warga masyarakat saling memberikan perhatian ketika ada tetangga atau keluarga yang tertimpa masalah kita ikut membantu. Demikian pula kondisi sosial lainnya seperti pemanfaatan teknologi.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu bahwa peran *civil society* dalam menunjang tercapainya *good governance* di Desa Sanrego kecamatan Kahu Kabupaten Bone di buktikan dengan keterlibatan masyarakat baik kalangan tua maupun kalangan muda seperti dalam *free public share*, berdemokrasi, sikap toleransi, kemajemukan suku yang tinggal di Desa Sanrego namun tetap menghargai dan menghormati kegiatan keagamaan dan adat istiadat, dan masih tingginya kondisi sosial (saling membantu) antar warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, dkk, 1999, *Membangun Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ardianto, Elvinaro. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbosa Rekatama Media.
- Damsar, 2015, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Efendi, H. N., Yulianto, Y., & Prihantika, I. (2019). *Dinamika Peran Civil Society dalam Ruang Publik: Studi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung*.

- Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 1(1), 19–28.
<https://doi.org/10.23960/administrativa.v1i1.2>.
- Gaffar, Afan, 1999, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jaya, Fahril, (2020), *Pengaruh Nilai – Nilai Kearifan Lokal Terhadap Gaya Kepemimpinan Transformasional Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone*. *Journal of Business and Management* e-ISSN: 2460-3767 p-ISSN: 2656-6885. Diakses Tanggal 17 Juni 2021.
- Fitria, Vita, (2020), *Civil Society, Konsep Ummah Dan Masyarakat Madani*, *Journal of Business and Management* e-ISSN: 2460-3767 p-ISSN: 2656-6885. Diakses Tanggal 17 Juni 2021.
- Hanifie, Haniah dan Sabhana, Ana Azmy, 2018. *Kekuatan-kekuatan Politik*. Depok : Rajawali Pers.
- Hikam, Muhammad AS, 1996, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Jumiati, Ipah, Ema, (2019), *Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat Sipil (Civil Society) Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Cilegon*, Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Diakses Tanggal 17 Juni 2021.
- Parmudi, Mochamad, (2015). *Kebangkitan Civil Society Di Indonesia*. Fisip UIN Walisongo. *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015. Diakses Tanggal 16 Juni 2021.
- Riyadi, 1985, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit
- Santoso, Riyadi, 1998, *Pemerintahan Yang Bersih dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- TIM ICCE UIN JAKARTA, 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.